

## Papua Tanah Damai di PBB

**Jenewa, 31 Maret 2005.** Dua pemimpin gereja Papua, Uskup Leo Laba Ladjar OFM dan Pdt. Hermann Saud, menggebrak Jenewa dengan paparan “Papua Tanah Damai”. Di tengah perhelatan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kedua pemimpin gereja memaparkan upaya mereka menangani konflik, mengangkat perkara pelanggaran HAM, dan mencari solusi damai sebagai langkah membangun persekutuan di antara masyarakat yang majemuk di Papua. “Politik memecah belah masyarakat tetapi sebaliknya, Injil mempersatukan masyarakat. Satu hal yang kami rindukan adalah untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat; dan untuk mewujudkannya, kami ingin menciptakan atmosfir damai dan adil yang memungkinkan pertumbuhan kesejahteraan umum bagi masyarakat kami” demikian penegasan Uskup Leo, Uskup Jayapura.



Pdt. Hermann Saud dalam penjelasannya menguraikan sejarah penderitaan bangsa Papua yang mengalami segala perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintah dan tentara Indonesia. Sejarah ini telah tertanam dalam ingatan penderitaan (*memoria passionis*) orang Papua. Lebih lanjut Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, denominasi gereja terbesar di Papua, menegaskan, “Kampanye Papua Tanah Damai (PTD) tidak identik dengan kampanye Papua Merdeka

karena tujuan utama kampanye PTD adalah bahwa entah Papua tetap menjadi salah satu Provinsi Indonesia atau menjadi negara merdeka, perdamaian harus meliputi Tanah Papua. Karena itu, kampanye perdamaian berbeda samasekali dengan kampanye kemerdekaan politik”.

Dalam diskusi Panel yang dimoderatori oleh Ravi Nair, Direktur *Asia Human Rights Documentation* India, Wakil Dubes RI untuk PBB, Eddi Hariyadi, hadir dan memberikan kata sambutan pada awal acara. Tamu-tamu undangan dari berbagai kalangan LSM, misi diplomatik di PBB dan wartawan memenuhi ruangan *Varembre Conference Centre*.

Selain kedua pemimpin gereja di Papua, salah seorang korban dari Komunitas Abepura, Peneas Lokbere, juga memberikan kesaksian atas pengalaman yang dialaminya ketika disiksa di tahanan Polres Jayapura dalam kaitan dengan peristiwa Abepura, 7 Desember 2000. Kasus ini tengah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar dan terus dipantau oleh LSM Jayapura dan Jakarta. SKP Jayapura sebagai bagian dari koalisi ini terus menyoroti proses persidangan ini dalam forum sidang Komisi HAM PBB (\*).

